



**Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

LAPORAN RENJA TRIWULAN. I

T.A 2025



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan OPD.

Renja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Penanggulangan Bencana dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen ini berisikan Evaluasi Renja Triwulan I (satu), merupakan evaluasi terhadap hasil Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan untuk memastikan bahwa Indikator Kinerja Program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikator kegiatan Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dapat dicapai.

Tanjungpinang, 08 April 2025

KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



AMMAD HASBI, M. Si
Pencina Utama Madya/ IV. d
NIP. 19060226 198002 1 000

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah	9
 BAB II TUJUAN DAN SASARAN RENJA	 11
 BAB III PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DPPA, RENJA DAN RENSTRA	 12
A. Jumlah Program dan Kegiatan DPPA, Renja dan Renstra	12
B. Perbandingan Jumlah Program DPPA, Renja dan Renstra	14
C. Perbandingan Jumlah Kegiatan DPPA, Renja dan Renstra	15
D. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPPA, Renja dan Renstra	18
 BAB IV CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA	 18
A. Capaian Target Indikator Sasaran	18
B. Capaian Target Indikator Program	19
C. Capaian Target Indikator Sub kegiatan	20
 BAB V KENDALA/ PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	 25
 BAB VI PENUTUP	 26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan	9
Tabel 2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	11
Tabel 3.1	Perbandingan DPPA, Renja dan Renstra Tahun 2024	12
Tabel 4.1	Pencapaian Target Indikator Sasaran Hingga Triwulan IV (Oktober - Desember 2024)	18
Tabel 4.2	Pencapaian Target Indikator Kinerja Hingga Triwulan IV (Oktober - Desember 2024)	19
Tabel 4.3	Pencapaian Realisasi Anggaran Hingga Triwulan IV (Oktober - Desember 2024)	20
Tabel 4.4	Pencapaian Target Indikator Sub Kinerja Hingga Triwulan IV (Oktober - Desember 2024)	21
Flowchart 1	Perbandingan jumlah Program DPPA, Renja dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024	15
Flowchart 2	Perbandingan jumlah Kegiatan DPPA, Renja dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024	16
Flowchart 3	Perbandingan jumlah Sub Kegiatan DPPA, Renja dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024	17
Lampiran		27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana, telah disebutkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dengan amanat Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sebagai dasar Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah,
- b. Pengarah Penanggulangan Bencana, dan
- c. Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana, kepala Badan bertanggungjawab

langsung kepada Gubernur. Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai sejak Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Pasca implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan secara preventif bukan responsif, artinya yang diperkuat adalah pencegahan dan kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana.

Kepala BPBD dijabat rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah, membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. Pengarah Penanggulangan bencana memiliki tugas dan fungsi: Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Sedangkan pelaksana Penanggulangan Bencana memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/ daerah, arsip dan dokumentasi, hubungan masyarakat dan keprotokoleran serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan rumah tangga persialan perlengkapan hubungan masyarakat dan keprotokoleran, melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan dan kebutuhan dasar logistik serta peralatan pada saat tanggap darurat, memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait dan kedaruratan, logistik dan peralatan, mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana, dan merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi antara lain :

- Penyusunan kebijakan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;

- e. Pengoordinasian kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- f. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- h. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja BPBD merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) BPBD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026.

Renja BPBD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD dalam satu tahun anggaran. Renja BPBD menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, selain itu Renja BPBD juga mengakomodir hasil Rapat Koordinasi Perangkat Daerah.

Program Penanggulangan Bencana berkaitan dengan misi 2 (dua) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yaitu 'Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan'. Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah kata 'Pelayanan', yang berarti bahwa pemerintah daerah melalui BPBD bertanggungjawab memberikan Pelayanan perlindungan terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Riau agar tercipta rasa aman.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah yang telah disusun. Hal ini untuk mengetahui sejauhmana kesesuaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibandingkan dengan dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah provinsi dicapai, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah provinsi. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi terhadap hasil Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5888 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan dan Organisasi tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 885);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 3 Provinsi Kepulauan Riau Nomor 83);

24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 902);
25. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 813/KPTS-26/III/2024 Tahun 2024 Tentang Sub Kegiatan Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);
28. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 03 Tahun 2025 tentang Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
29. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 70/KPTS-34/I/2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
30. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69/KPTS-34/I/2025 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Evaluasi terhadap hasil Renja tahun 2025 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan serta mengetahui tingkat ketercapaiannya.

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025 berdasarkan target-target indikator yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2025;

- e. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

D. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini memuat tentang metode evaluasi Renja Perangkat Daerah, meliputi metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah ini adalah dengan menggunakan formulir evaluasi Renja yang akan diisi capaiannya oleh masing-masing bidang.

b. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja ini adalah dengan menghitung: (1) persentase capaian kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Perangkat Daerah; (2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 1
Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan

No.	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 1	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 2	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 3	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 4	Status
1	22,5 % ≤ 100 %	45 % ≤ 100 %	66 % ≤ 100%	91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi (ST)
2	20 % ≤ 22,5 %	39 % ≤ 44 %	58 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3	17 % ≤ 19 %	33 % ≤ 36 %	50 % ≤ 57%	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4	13 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32 %	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 13 %	≤ 26 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

c. Teknik Analisis Data

Teknis analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis permasalahan yang hadapi perangkat daerah dalam pencapaian target Ranja Perangkat Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Bab ini berisi tentang uraian tujuan, sasaran dan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi. Penyajian tujuan, sasaran dan Renja Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel. 2
 Tujuan dan Sasaran Renja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Sat.	Target Kinerja Tahun 2023	Revisi Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2023
1.	Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan			Kategori	88			
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai	74,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perbaikan sistem informasi kinerja bidang urusan pemerintahan dan pelayanan umum serta peningkatan transparansi	100
2.	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Rata-rata Tingkat, Tingkat Dan Tingkat Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah			Indeks	0,48			
			Meningkatnya Kualitas Masyarakat Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,48	Program Penguatan Bencana	Indeks Penanganan Bencana Indeks Pemulihan Rekonstruksi dan Peningkatan Ketahanan Daerah Bencana Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,60 0,70 0,40

BAB III

PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DPA, RENJA DAN REN STRA

Bab ini berisi tentang uraian perbandingan antara jumlah program, kegiatan dan anggaran DPA, Renja dan Renstra Tahun Anggaran 2025 Perangkat Daerah.

A. Jumlah Program dan Kegiatan DPA, Renja dan Renstra

Jumlah Program dan Kegiatan DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah BPSD Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
 Perbandingan DPA, Renja dan Renstra Tahun 2025

Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Program Kegiatan Sub Kegiatan	DPA	RENJA	REN STRA
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	✓	✓	✓
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	✓	✓	✓
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	✓	✓	✓
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	✓	✓	✓
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-BKPD	X	✓	✓
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja BKPD	✓	✓	✓
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	✓	✓	✓
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	✓	✓	✓
1.05.01.1.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	✓	✓	✓
1.05.01.1.02.0002	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	✓	✓	✓
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran BKPD	X	✓	✓
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	✓	✓	✓
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Resmi Akibat Kelangkaannya	✓	✓	✓
1.05.01.1.05.0005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	X	✓	✓

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	OPA	RENJA	RENSTRA
1.02.01.1.02.0011	Sinergis Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	X	✓	✓
1.02.01.1.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	✓	✓	✓
1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	✓	✓	✓
1.02.01.1.02.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	✓	✓	✓
1.02.01.1.02.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	✓	✓	✓
1.02.01.1.02.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	✓	✓	✓
1.02.01.1.02.0007	Penyediaan Bahan Material	✓	✓	✓
1.02.01.1.02.0008	Facilitas Kunjungan Tamu	✓	✓	✓
1.02.01.1.02.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	✓	✓	✓
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓	✓	✓
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	✓	✓	✓
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓	✓	✓
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	✓	✓	✓
1.02.01.1.02.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	X	✓	✓
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	✓	✓	✓
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓	✓	✓
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	✓	✓	✓
1.02.01.1.09.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	✓	✓	✓
1.02.01.1.09.0003	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	✓	✓	✓
1.02.02	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	✓	✓	✓
1.02.02.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	✓	✓	✓
1.02.02.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	X	✓	✓
1.02.02.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	✓	✓	✓
1.02.02.1.02.0013	Pengujian Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	X	✓	✓
1.02.02.1.02.0023	Geddi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	X	✓	✓
1.02.02.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	X	✓	✓
1.02.02.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	X	✓	✓
1.02.02.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana	✓	✓	✓
1.02.02.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	X	✓	✓
1.02.02.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	✓	✓	✓

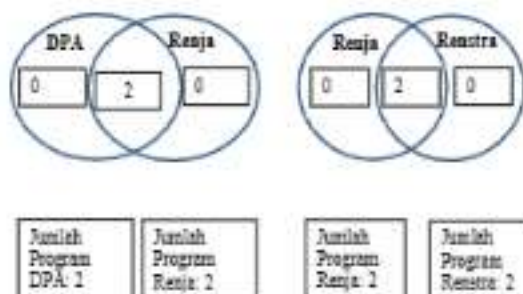
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPA	RENJA	RENSTRA
1.05.03.1.02.0023	Pengendalian Operasi dan Penyelesaian Bencana Preparasi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	✓	✓	✓
1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	✓	✓	✓
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	✓	✓	✓
1.05.03.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Asesur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	X	✓	✓
1.05.03.1.03.0004	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	X	✓	✓
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Perlindungan dan Evakuasi Korban Bencana	✓	✓	✓
1.05.03.1.03.0028	Penyelesaian Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	✓	✓	✓
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	✓	✓	✓
1.05.03.1.03.0031	Aktivas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	✓	✓	✓
1.05.03.1.04	Pendataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	✓	✓	✓
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	X	✓	✓
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	✓	✓	✓
1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pasca bencana Provinsi	✓	✓	✓
1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca bencana Provinsi	X	✓	✓
1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	X	✓	✓
1.05.03.1.04.0015	Peningkatan Kapasitas SDM Asesur dalam Penanganan Kedaruratan Provinsi	X	✓	✓
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	X	✓	✓
1.05.03.1.04.0018	Pengujian Kesiapsiagaan Bencana Daerah	X	✓	✓
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Komitmen dalam Penanggulangan Bencana	✓	✓	✓
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemertastan Sistem Informasi Kebencanaan	✓	✓	✓
1.05.03.1.04.0025	Pemilihan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten Kota	✓	✓	✓

B. Perbandingan Jumlah Program DPA, Renja dan Renstra

Perbandingan antara jumlah Program dalam DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 dapat dilihat pada flowchart 1 berikut;

Flowchart 1:

Perbandingan Jumlah Program DPPA, Renja dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025



Uraian penjelasan;

Jumlah Program yang dilaksanakan BPBD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 konsisten di mana jumlah program dalam Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sangat konsisten yaitu terdiri dari 2 (dua) Program yang sama baik nama program maupun jumlah programnya, yaitu:

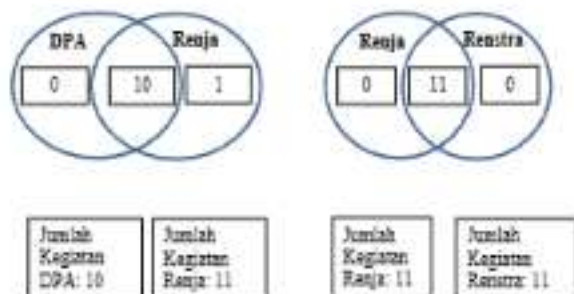
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Penanggulangan Bencana

C. Perbandingan Jumlah Kegiatan DPPA, Renja dan Renstra

Perbandingan antara jumlah Kegiatan dalam DPPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 dapat dilihat pada flowchart 2 berikut;

Flowchart 2:

Perbandingan Jumlah Kegiatan DPA, Renja dan Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025



Uraian penjelasan:

Dari diagram diatas dapat digambarkan bahwa berdasarkan analisa dokumen dapat dijelaskan bahwa pada DPA tahun 2025 terdapat 10 (sepuluh) kegiatan, dokumen Rencana Kerja terdapat 11 (sebelas) kegiatan yang terdapat di BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Sementara itu tidak terdapat perbedaan dokumen Rencana Kerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dan dokumen Rencana Strategis BPBD Provinsi Kepulauan Riau, yaitu adanya 11 (sebelas) kegiatan.

D. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA, Renstra, dan Renja

Perbandingan antara jumlah Sub Kegiatan dalam DPA, Renstra, dan Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 dapat dilihat pada flowchart 3 berikut;

Flowchart 3:

Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA,

Renstra, dan Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025



Uraian penjelasan:

Dari diagram di atas dapat digambarkan bahwa berdasarkan analisa dokumen dapat dijelaskan bahwa pada DPA tahun 2025 hingga Triwulan I terdapat 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dan terdapat perbedaan terhadap dokumen Rencana Kerja Perubahan BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang total kegiatan dalam Rencana Kerja BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 terdapat 51 (lima puluh satu) sub kegiatan.

Sementara itu Rencana Kerja Perubahan BPBD Provinsi Kepulauan Riau dan dokumen Rencana Strategis Perubahan BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 berjumlah sama yaitu terdapat 51 (lima puluh satu) sub kegiatan.

BAB IV

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA

Bab ini berisi tentang data informasi dan uraian analisis capaian kinerja sasaran, program dan sub kegiatan renja perangkat daerah.

A. Capaian Target Indikator Sasaran

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator sasaran Renja yang dievaluasi.

Tabel 4.1
Pencapaian Target Indikator Sasaran Hingga Triwulan I
(Januari - Maret 2025)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024	Realisasi TW I 2025	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Ulangkaji Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai	74,00	0,00	0,00	SR
2.	Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang Tangguh, Tangkas dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Ulangkaji Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,46	0,00	0,00	SR

Hingga Triwulan I Tahun 2025 (data hingga 18 Maret 2025) realisasi indikator kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah sebesar 0,00 % Kategori Kinerja Sangat Rendah (SR) dan realisasi indikator kinerja Sasaran Indeks Ketahanan Daerah 0,00 % Kategori Kinerja Sangat Rendah (SR).

Kedua indikator sasaran tersebut dapat di hitung pada akhir tahun anggaran oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

B. Capaian Target Indikator Program

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator Program Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja Program Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Hingga Triwulan I
(Januari - Maret 2025)

No	Program	Indikator	satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Keabsahan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	100	25	25	ST
2.	Penanggulangan Bencana	Indeks Pencegahan Bencana	Indeks	1,40	0,00	0,00	SR
		Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,30	0,00	0,00	SR
		Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Indeks	0,42	0,00	0,00	SR

Hingga Triwulan I Tahun 2025 (data hingga 31 Maret 2025) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi berstatus Sangat Tinggi (ST) 25 %, sedangkan Program penanggulangan Bencana memiliki tiga (3) Indikator yaitu Indeks Pencegahan Bencana, Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana dan Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0,00 % Kategori Kinerja Sangat Rendah (SR).

Indikator Program Penanggulangan Bencana dapat di hitung dan di nilai pada akhir tahun anggaran oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kapasitas Daerah.

Sementara informasi dan analisis capaian realisasi anggaran program Renja BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang dievaluasi dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut

Tabel. 4.3
Pencapaian Realisasi Anggaran Hingga Triwulan I
(Januari - Maret 2025)

No	Nama Program	Realisasi Anggaran (%)	Status
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23,46	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	10,92	Sangat Rendah

Hingga Triwulan I Tahun 2025 (data hingga 31 Maret 2025) realisasi anggaran program berkategori Sangat Tinggi (ST) 1 program yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (23,46 %), dan realisasi anggaran program berkategori Sangat Rendah (SR) yaitu Program Penanggulangan Bencana (10,92 %).

Pencapaian Realisasi Anggaran pada status Sangat Rendah di karenakan serapan Anggaran hanya pada rutinitas kantor, penyesuaian atas terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia – Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. Capaian Target Indikator Sub Kegiatan

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator sub kegiatan dan anggaran Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja indikator sub kegiatan dan anggaran Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Pencapaian Target Indikator Sub Kegiatan Hingga Triwulan I
(Januari - Maret 2025)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp/ribu)		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Ranja		Kinerja dan Anggaran Ranja	
		DPA	Realisasi	Kinerja %	Realisasi %	K	R
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
1.1.	Pemantauan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.475.152	3.127.300	-	4,30	SR	SR
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	15.442.570	1.122.000	-	6,11	SR	SR
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.305.926	1.625.000	-	4,43	SR	SR
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.705.054.968	1.348.035.615	20,97	23,58	BT	BT
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	294.488.200	43.240.000	-	14,68	SR	R
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
1.	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Alat Peralengkapannya	33.525.500	-	-	-	SR	SR
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1.	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	16.812.371	-	-	-	SR	SR
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.132.400	-	-	-	SR	SR
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000	4.021.331	-	23,65	SR	BT
4.	Penyediaan Barang Dikeluar dan Pengadaan	8.213.500	-	-	-	SR	SR
5.	Penyediaan Bahan/ Material	12.043.500	-	-	-	SR	SR
6.	Fasilitas Katering Tamu	5.000.000	500.000	-	10,00	SR	SR
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.757.500	17.076.500	-	8,26	SR	SR

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp/mt)		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renc		Kinerja dan Anggaran Renc	
		DPA	Realisasi	Kinerja %	Realisasi %	K	R
1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.282.400	120.000.000	100,00	99,93	ST	ST
1.8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.037.600	26.662.393	-	20,82	SR	T
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.320.855.835	318.938.392	-	24,00	SR	ST
1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jekel	160.112.942	26.260.000	-	17,49	SR	S
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.121.000	-	-	-	SR	SR
3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	-	-	-	SR	SR
II. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
8.1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana							
1.	Pengelolaan Risiko Bencana	94.814.679	-	-	-	SR	SR
2.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	90.146.620	5.000.000	-	5,00	SR	SR
3.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	30.000.000	1.200.000	-	2,40	SR	SR
4.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	96.366.160	-	-	-	SR	SR
8.2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							
1.	Pencarian, Perlindungan dan Evakuasi Korban Bencana	22.705.000	2.722.000	-	25,19	SR	ST
2.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	306.511.116	25.349.400	20,00	8,27	T	SR
3.	Respon Cepat/ Penanganan Darurat Bencana	432.047.579	109.301.018	25,00	25,30	ST	ST

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp/lt)		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja		Kinerja dan Anggaran Renja	
		DPA	Realisasi	Kinerja %	Realisasi %	R	R
4.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Bencana	13.644.000	-	-	-	SR	SR
8.2. Peningkatan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							
1.	Peningkatan Pasca Bencana Provinsi	330.190.421	30.234.100	-	10,79	SR	SR
2.	Koordinasi Peningkatan Pasca bencana Provinsi	41.226.668	-	-	-	SR	SR
3.	Kerja Sama Antar Lembaga dan Komisioner dalam Penanggulangan Bencana	68.724.778	-	-	-	SR	SR
4.	Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	65.334.477	-	-	-	SR	SR
5.	Peningkatan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	40.548.860	-	-	-	SR	SR
JUMLAH		9.980.400.202	2.120.122.000		21,31		T

Hingga Triwulan I Tahun 2025 (data hingga 31 Maret 2025) realisasi target indikator sub kegiatan yang berkategori Kinerja status Sangat Tinggi (ST) ada 3 (tiga), yaitu 2 (dua) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 1 (satu) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana. Realisasi target indikator sub kegiatan yang berkategori Kinerja Status Tinggi (T) ada 1 (satu), yaitu sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana. Realisasi target indikator sub kegiatan yang berkategori Kinerja status Sangat Rendah (SR) ada 28 (dua puluh delapan), yaitu 17 (tujuh belas) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 11 (sebelas) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana.

Realisasi Anggaran Sangat Tinggi (ST) ada 8 (delapan), yaitu 4 (empat) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 2 (dua) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana. Status Tinggi (T) ada 1 (satu) yaitu sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Status Sedang (S) ada 1 (satu) yaitu sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Status Rendah (R) ada 1 (satu) yaitu sub kegiatan

pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Status Sangat Rendah (SR) ada 23 (dua puluh tiga), yaitu 11 (sebelas) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 12 (dua belas) sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana.

Pencapaian Realisasi target indikator sub kegiatan dan Anggaran pada status Sangat Rendah di karenakan serapan Anggaran hanya pada rutinitas kantor, penyesuaian atas terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia – Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB V

KENDALA/ PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 (data hingga 31 Maret 2025) Tahun Anggaran 2025 adalah disebabkan penyesuaian atas terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia – Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Inpres tersebut terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dapat di jalankan dan pelaksanaan kegiatan tertunda hingga di tetapkannya APBD perubahan melalui mekanisme PERKADA.

Penilaian Indeks Kapasitas Daerah oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan indikator Sasaran BPBD Provinsi Kepulauan Riau paling cepat dapat di Nilai pada Januari 2026, sehingga penyusunan pelaporan belum dapat di susun pada akhir Anggaran 2025.

BAB VI

PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPBD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2025 telah berusaha menunjukkan kinerja yang maksimal melalui pelaksanaan serangkaian program-program yang dituangkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang diembannya untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

Pada Tahun Anggaran 2025 BPBD Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 2 (dua) Program yang terbagi dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan.

Secara umum realisasi Kinerja dan Keuangan BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau, hingga Triwulan I tahun 2025 akhir Maret 2025 rata-rata realisasi keuangan mencapai 21,31 % dengan kategori **Tinggi (T)**, sedangkan realisasi Kinerja indikator kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan realisasi Indikator kinerja Sasaran Indeks Ketahanan Daerah dapat di hitung dan di nilai pada akhir tahun 2025/ awal tahun 2026.

Demikianlah Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan I BPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan BPBD Provinsi Kepulauan Riau serta menjadi bahan evaluasi dan pengendalian pada Tahun berikutnya. Dengan dibuatnya laporan evaluasi hasil Renja Triwulan I BPBD Provinsi Kepulauan Riau ini diharapkan akan lebih memudahkan bagi pimpinan dan staf dalam mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan ke depannya.

TTd,
Perencana Ahli Muda

LAMPIRAN

Kategorie	Produkt	Beschreibung	Preis		Menge		Gesamt		Währung	Anmerkungen
			Einzel	Stück	Einzel	Stück	Einzel	Stück		
Produkte	Produkt 1	Produkt 1 Beschreibung	10,00	100	1000,00	100	1000,00	100	EUR	
	Produkt 2	Produkt 2 Beschreibung	20,00	200	4000,00	200	4000,00	200	EUR	
	Produkt 3	Produkt 3 Beschreibung	30,00	300	9000,00	300	9000,00	300	EUR	
	Produkt 4	Produkt 4 Beschreibung	40,00	400	16000,00	400	16000,00	400	EUR	
	Produkt 5	Produkt 5 Beschreibung	50,00	500	25000,00	500	25000,00	500	EUR	
	Produkt 6	Produkt 6 Beschreibung	60,00	600	36000,00	600	36000,00	600	EUR	
	Produkt 7	Produkt 7 Beschreibung	70,00	700	49000,00	700	49000,00	700	EUR	
	Produkt 8	Produkt 8 Beschreibung	80,00	800	64000,00	800	64000,00	800	EUR	
	Produkt 9	Produkt 9 Beschreibung	90,00	900	81000,00	900	81000,00	900	EUR	
	Produkt 10	Produkt 10 Beschreibung	100,00	1000	100000,00	1000	100000,00	1000	EUR	
Dienstleistungen	Dienstleistung 1	Dienstleistung 1 Beschreibung	15,00	150	2250,00	150	2250,00	150	EUR	
	Dienstleistung 2	Dienstleistung 2 Beschreibung	25,00	250	6250,00	250	6250,00	250	EUR	
	Dienstleistung 3	Dienstleistung 3 Beschreibung	35,00	350	12250,00	350	12250,00	350	EUR	
	Dienstleistung 4	Dienstleistung 4 Beschreibung	45,00	450	20250,00	450	20250,00	450	EUR	
	Dienstleistung 5	Dienstleistung 5 Beschreibung	55,00	550	30250,00	550	30250,00	550	EUR	
	Dienstleistung 6	Dienstleistung 6 Beschreibung	65,00	650	42250,00	650	42250,00	650	EUR	
	Dienstleistung 7	Dienstleistung 7 Beschreibung	75,00	750	56250,00	750	56250,00	750	EUR	
	Dienstleistung 8	Dienstleistung 8 Beschreibung	85,00	850	72250,00	850	72250,00	850	EUR	
	Dienstleistung 9	Dienstleistung 9 Beschreibung	95,00	950	90250,00	950	90250,00	950	EUR	
	Dienstleistung 10	Dienstleistung 10 Beschreibung	105,00	1050	110250,00	1050	110250,00	1050	EUR	

[illegible]

Project Information		Project Name		Project Location		Project Type		Project Status		Project Budget		Project Timeline	
		Project Name	Project Location	Project Type	Project Status	Project Budget	Project Timeline						
Project ID	Project Name	Project Location	Project Type	Project Status	Project Budget	Project Timeline							
001	Project A	Location A	Type A	Status A	Budget A	Timeline A							
002	Project B	Location B	Type B	Status B	Budget B	Timeline B							
003	Project C	Location C	Type C	Status C	Budget C	Timeline C							
004	Project D	Location D	Type D	Status D	Budget D	Timeline D							
005	Project E	Location E	Type E	Status E	Budget E	Timeline E							
006	Project F	Location F	Type F	Status F	Budget F	Timeline F							
007	Project G	Location G	Type G	Status G	Budget G	Timeline G							
008	Project H	Location H	Type H	Status H	Budget H	Timeline H							
009	Project I	Location I	Type I	Status I	Budget I	Timeline I							
010	Project J	Location J	Type J	Status J	Budget J	Timeline J							
011	Project K	Location K	Type K	Status K	Budget K	Timeline K							
012	Project L	Location L	Type L	Status L	Budget L	Timeline L							
013	Project M	Location M	Type M	Status M	Budget M	Timeline M							
014	Project N	Location N	Type N	Status N	Budget N	Timeline N							
015	Project O	Location O	Type O	Status O	Budget O	Timeline O							
016	Project P	Location P	Type P	Status P	Budget P	Timeline P							
017	Project Q	Location Q	Type Q	Status Q	Budget Q	Timeline Q							
018	Project R	Location R	Type R	Status R	Budget R	Timeline R							
019	Project S	Location S	Type S	Status S	Budget S	Timeline S							
020	Project T	Location T	Type T	Status T	Budget T	Timeline T							
021	Project U	Location U	Type U	Status U	Budget U	Timeline U							
022	Project V	Location V	Type V	Status V	Budget V	Timeline V							
023	Project W	Location W	Type W	Status W	Budget W	Timeline W							
024	Project X	Location X	Type X	Status X	Budget X	Timeline X							
025	Project Y	Location Y	Type Y	Status Y	Budget Y	Timeline Y							
026	Project Z	Location Z	Type Z	Status Z	Budget Z	Timeline Z							
027	Project AA	Location AA	Type AA	Status AA	Budget AA	Timeline AA							
028	Project AB	Location AB	Type AB	Status AB	Budget AB	Timeline AB							
029	Project AC	Location AC	Type AC	Status AC	Budget AC	Timeline AC							
030	Project AD	Location AD	Type AD	Status AD	Budget AD	Timeline AD							
031	Project AE	Location AE	Type AE	Status AE	Budget AE	Timeline AE							
032	Project AF	Location AF	Type AF	Status AF	Budget AF	Timeline AF							
033	Project AG	Location AG	Type AG	Status AG	Budget AG	Timeline AG							
034	Project AH	Location AH	Type AH	Status AH	Budget AH	Timeline AH							
035	Project AI	Location AI	Type AI	Status AI	Budget AI	Timeline AI							
036	Project AJ	Location AJ	Type AJ	Status AJ	Budget AJ	Timeline AJ							
037	Project AK	Location AK	Type AK	Status AK	Budget AK	Timeline AK							
038	Project AL	Location AL	Type AL	Status AL	Budget AL	Timeline AL							
039	Project AM	Location AM	Type AM	Status AM	Budget AM	Timeline AM							
040	Project AN	Location AN	Type AN	Status AN	Budget AN	Timeline AN							
041	Project AO	Location AO	Type AO	Status AO	Budget AO	Timeline AO							
042	Project AP	Location AP	Type AP	Status AP	Budget AP	Timeline AP							
043	Project AQ	Location AQ	Type AQ	Status AQ	Budget AQ	Timeline AQ							
044	Project AR	Location AR	Type AR	Status AR	Budget AR	Timeline AR							
045	Project AS	Location AS	Type AS	Status AS	Budget AS	Timeline AS							
046	Project AT	Location AT	Type AT	Status AT	Budget AT	Timeline AT							
047	Project AU	Location AU	Type AU	Status AU	Budget AU	Timeline AU							
048	Project AV	Location AV	Type AV	Status AV	Budget AV	Timeline AV							
049	Project AW	Location AW	Type AW	Status AW	Budget AW	Timeline AW							
050	Project AX	Location AX	Type AX	Status AX	Budget AX	Timeline AX							
051	Project AY	Location AY	Type AY	Status AY	Budget AY	Timeline AY							
052	Project AZ	Location AZ	Type AZ	Status AZ	Budget AZ	Timeline AZ							
053	Project BA	Location BA	Type BA	Status BA	Budget BA	Timeline BA							
054	Project BB	Location BB	Type BB	Status BB	Budget BB	Timeline BB							
055	Project BC	Location BC	Type BC	Status BC	Budget BC	Timeline BC							
056	Project BD	Location BD	Type BD	Status BD	Budget BD	Timeline BD							
057	Project BE	Location BE	Type BE	Status BE	Budget BE	Timeline BE							
058	Project BF	Location BF	Type BF	Status BF	Budget BF	Timeline BF							
059	Project BG	Location BG	Type BG	Status BG	Budget BG	Timeline BG							
060	Project BH	Location BH	Type BH	Status BH	Budget BH	Timeline BH							
061	Project BI	Location BI	Type BI	Status BI	Budget BI	Timeline BI							
062	Project BJ	Location BJ	Type BJ	Status BJ	Budget BJ	Timeline BJ							
063	Project BK	Location BK	Type BK	Status BK	Budget BK	Timeline BK							
064	Project BL	Location BL	Type BL	Status BL	Budget BL	Timeline BL							
065	Project BM	Location BM	Type BM	Status BM	Budget BM	Timeline BM							
066	Project BN	Location BN	Type BN	Status BN	Budget BN	Timeline BN							
067	Project BO	Location BO	Type BO	Status BO	Budget BO	Timeline BO							
068	Project BP	Location BP	Type BP	Status BP	Budget BP	Timeline BP							
069	Project BQ	Location BQ	Type BQ	Status BQ	Budget BQ	Timeline BQ							
070	Project BR	Location BR	Type BR	Status BR	Budget BR	Timeline BR							
071	Project BS	Location BS	Type BS	Status BS	Budget BS	Timeline BS							
072	Project BT	Location BT	Type BT	Status BT	Budget BT	Timeline BT							
073	Project BU	Location BU	Type BU	Status BU	Budget BU	Timeline BU							
074	Project BV	Location BV	Type BV	Status BV	Budget BV	Timeline BV							
075	Project BW	Location BW	Type BW	Status BW	Budget BW	Timeline BW							
076	Project BX	Location BX	Type BX	Status BX	Budget BX	Timeline BX							
077	Project BY	Location BY	Type BY	Status BY	Budget BY	Timeline BY							
078	Project BZ	Location BZ	Type BZ	Status BZ	Budget BZ	Timeline BZ							
079	Project CA	Location CA	Type CA	Status CA	Budget CA	Timeline CA							
080	Project CB	Location CB	Type CB	Status CB	Budget CB	Timeline CB							
081	Project CC	Location CC	Type CC	Status CC	Budget CC	Timeline CC							
082	Project CD	Location CD	Type CD	Status CD	Budget CD	Timeline CD							
083	Project CE	Location CE	Type CE	Status CE	Budget CE	Timeline CE							
084	Project CF	Location CF	Type CF	Status CF	Budget CF	Timeline CF							
085	Project CG	Location CG	Type CG	Status CG	Budget CG	Timeline CG							
086	Project CH	Location CH	Type CH	Status CH	Budget CH	Timeline CH							
087	Project CI	Location CI	Type CI	Status CI	Budget CI	Timeline CI							
088	Project CJ	Location CJ	Type CJ	Status CJ	Budget CJ	Timeline CJ							
089	Project CK	Location CK	Type CK	Status CK	Budget CK	Timeline CK							
090	Project CL	Location CL	Type CL	Status CL	Budget CL	Timeline CL							
091	Project CM	Location CM	Type CM	Status CM	Budget CM	Timeline CM							
092	Project CN	Location CN	Type CN	Status CN	Budget CN	Timeline CN							
093	Project CO	Location CO	Type CO	Status CO	Budget CO	Timeline CO							
094	Project CP	Location CP	Type CP	Status CP	Budget CP	Timeline CP							
095	Project CQ	Location CQ	Type CQ	Status CQ	Budget CQ	Timeline CQ							
096	Project CR	Location CR	Type CR	Status CR	Budget CR	Timeline CR							
097	Project CS	Location CS	Type CS	Status CS	Budget CS	Timeline CS							
098	Project CT	Location CT	Type CT	Status CT	Budget CT	Timeline CT							
099	Project CU	Location CU	Type CU	Status CU	Budget CU	Timeline CU							
100	Project CV	Location CV	Type CV	Status CV	Budget CV	Timeline CV							

[illegible]